

BAB I

PENDAHULIAN

1.1.Latar Belakang

Kondisi persampahan di Indonesia memasuki tingkat darurat sampah. Timbulan sampah semakin meningkat setiap tahunnya. Timbulan sampah meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Dari seluruh timbulan sampah yang ada, sampah yang dikelola oleh pemerintah belum mencapai seluruhnya atau 100 %.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. Adanya sistem pengelolaan sampah ini ditujukan untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Strategi dan penyelenggaraan pengelolaan sampah menjadi wewenang pemerintah kota setempat sebagaimana di disebutkan dalam undang-undang pengelolaan sampah.

Kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini masih mengikuti paradigma lama yaitu dengan memindahkan sampah dari sumber menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah dari sumber ditampung sementara di lokasi-lokasi tertentu atau transfer depo. Pengangkutan sampah dilakukan setelah sampah terkumpul di transfer depo maupun lokasi tertentu yang melewati menuju TPA.

Pertumbuhan volume sampah di Yogyakarta semakin meningkat setiap tahun, kebutuhan akan pelayanan sampah juga meningkat mengikuti jumlah sampah. Jumlah sampah yang terangkut tidak sebanding dengan timbulan sampah. Pada tahun 2015 jumlah sampah yang terangkut sebesar 112.863,19 m³/tahun (DLH Kabupaten Sleman, 2015).

Selain masalah volume sampah yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini juga menghadapi berbagai persoalan terkait penanganan sampah, berupa keterbatasan biaya operasional dan sarana prasarana pengelolaannya. Besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Sleman untuk menangani sampah pada tahun 2006 sebesar 905,7 juta rupiah. Dari anggaran tersebut jumlah sampah yang tertangani baru mencapai 85% dari total sampah yang dihasilkan (Sugiarto, 2006 dalam Putra, 2013).

Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan perubahan dari sistem pengelolaan sampah dengan paradigma lama menjadi sistem baru. Sistem pengelolaan sampah diterapkan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sampah dari sumber dilakukan pemilahan dan pengolahan untuk mengurangi besarnya sampah yang dikirim ke TPA. Perubahan sistem dilakukan dengan harapan 30% volume sampah berkurang dengan keterlibatan masyarakat dan 70% sampah dapat ditangani dengan pelayanan dari pemerintah.

Berdasarkan paparan diatas, masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terkait dengan capaian pengelolaan persampahan di Kabupaten Sleman dan melakukan evaluasi untuk menentukan target yang harus dicapai dalam peningkatan layanan pengelolaan persampahan.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah pada aspek Teknik operasional?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas seperti berikut,

1. Mengetahui kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah perkotaan yang ada di Kabupaten Sleman,

2. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah perkotaan pada aspek Teknik operasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah

1. Sebagai bahan referensi penyempurnaan system pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman
2. Sebagai bahan kajian penelitian dalam bidang persampahan di Kabupaten Sleman

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan memperhatikan Batasan-batasan sebagai berikut:

1. Wilayah kajian penelitian adalah Kabupaten Sleman;
2. Aspek pengelolaan sampah yang dianalisis adalah aspek teknis operasional;
3. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY, dan Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan Pemukiman Berbasis Masyarakat Provinsi DIY;
4. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi kuantitatif.